

## ABSTRAK

### **Eliyah Tiandra, 1218010048, (2025) Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS RI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jakarta Timur**

Penelitian ini membahas implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni oleh BAZNAS RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jakarta Timur. Program merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang ditujukan untuk membantu masyarakat prasejahtera agar memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya hunian yang layak sebagai bagian dari indikator kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin di perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jakarta Timur. Program ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat prasejahtera agar memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep teori administrasi publik, kebijakan publik dan juga implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan publik George C Edward III (1980) dengan empat faktor kritis untuk menilai sebuah implementasi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, yang digunakan sebagai alat analisis sejauh mana implementasi program bantuan rumah layak huni.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pelaksana program di tingkat pusat (BAZNAS RI), daerah (BAZNAS BAZIS DKI Jakarta), kelurahan, serta masyarakat penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tergolong cukup efektif. Komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan baik meskipun media informasi publik masih terbatas. Sumber daya manusia dan anggaran cukup mendukung, meskipun jumlah tenaga pelaksana masih terbatas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, dan struktur birokrasi telah tertata melalui SOP dan koordinasi lintas tingkat. Namun, tantangan tetap ditemukan terutama pada aspek dokumentasi dan monitoring di lapangan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rumah Layak Huni, BAZNAS RI, Kesejahteraan Masyarakat, George C. Edward III**